



STRATEGI DAN PERAN PUSTAKAWAN DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Anisa Sri Restanti

Pustakawan UPT Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman

Jl. HR. Bunyamin 708, Purwokerto Telp./Fax. (0281) 630845

anisasrirestanti@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan penandatanganan Piagam ASEAN dan Cetak biru ASEAN menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-13 di Singapura (November, 2007), Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN harus siap menghadapi konsekuensi dari integritas ekonomi tersebut. Secara umum, pembentukan pasar tunggal akan memberi peluang bagi Indonesia sehubungan dengan semakin terbukanya pasar bebas bagi ekspor Indonesia. Di sisi lain, hal tersebut juga menjadi tantangan karena Indonesia akan menjadi pasar bagi negara-negara ASEAN lainnya. Demikian halnya dalam dunia kepustakawanan, khususnya sumber daya manusia (pustakawan) tidak dapat menghindari terjadinya kompetisi global. Pustakawan membutuhkan strategi dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam MEA. Selain itu sebagai bagian dari elemen bangsa, pustakawan harus bisa berperan positif dengan memberdayakan masyarakat Indonesia dalam menghadapi era komunitas ASEAN. Penulisan ini menggunakan metode *literature study*. Berdasarkan studi literatur dapat diketahui, strategi yang perlu dilakukan pustakawan dalam menghadapi MEA adalah (1) melaksanakan kode etik profesi, (2) komitmen terhadap profesi, (3) Mau keluar dari zona “nyaman”, (4) pengembangan diri, (5) memiliki kompetensi tersertifikasi. Adapun peran pustakawan dalam memberdayakan masyarakat adalah dengan melakukan literasi informasi yaitu upaya yang dilakukan oleh pustakawan sebagai individu ataupun secara lembaga (perpustakaan) agar masyarakat “melek” informasi. Masyarakat yang melek informasi akan menjadi pembelajar seumur hidup yang mengetahui kapan dia butuh informasi, bagaimana mendapatkan, menggunakan/ memanfaatkan, dan menyebarkan informasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa MEA tidak dapat dihindari, pustakawan dapat memanfaatkan setiap peluang dan tantangan yang ada melalui berbagai strategi. Dan, dengan melakukan literasi informasi, pustakawan telah berperan dalam meningkatkan kompetensi masyarakat di tengah kompetisi global.

Kata Kunci: Masyarakat Ekonomi ASEAN, Kepustakawanan, Sumber Daya Manusia, Pustakawan

PENDAHULUAN

Secara geopolitik dan geo ekonomi, kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat strategis. Hal tersebut tercermin dari adanya berbagai konflik di kawasan yang melibatkan kepentingan negara-besar pasca Perang Dunia II, sehingga Asia Tenggara pernah dijuluki sebagai “Balkan-nya Asia” (ASEAN, 2007). Dilatarbelakangi oleh hal itu, negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk kerja sama untuk meredakan rasa saling curiga dan membangun rasa saling percaya, serta mendorong kerja sama pembangunan kawasan.

Upaya pembentukan organisasi kerja sama kawasan telah membuahkan hasil dengan ditandatanganinya Deklarasi ASEAN atau deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Deklarasi tersebut menandai berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of South East Asian Nations/ASEAN). Masa awal pendirian ASEAN lebih diwarnai oleh upaya-upaya membangun rasa saling percaya antar negara anggota guna mengembangkan kerja sama regional yang bersifat kooperatif namun belum bersifat integratif (ASEAN, 2007).

Kerja sama regional ini semakin diperkuat dengan semangat stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara, antara lain melalui percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya dengan tetap memerhatikan kesetaraan dan kemitraan, sehingga menjadi landasan untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera dan damai. Pada tahun 1992 berlangsung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura. Konferensi tersebut menghasilkan ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi serta pasar regional.

Dengan berjalannya waktu para pimpinan negara ASEAN kembali memformulasikan “ASEAN Vision 2020” di Kuala Lumpur pada 15 Desember 1997 yang menjadi tujuan jangka panjang ASEAN. Rencana jangka panjang pembentukan komunitas ASEAN ini terdiri dari tiga pilar, yaitu ASEAN Economic Community (AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN-MEA), ASEAN Security Community (ASC), dan ASEAN Socio-cultural Community (ASCC). Dengan pencapaian MEA maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi di mana terjadi aliran barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas, serta aliran modal yang lebih bebas.

Library, archive, museum and other cultural services menjadi salah satu subsektor jasa dalam ASEAN Framework Agreement On Services. Pustakawan sebagai salah satu sumber daya manusia dalam perpustakaan harus siap menghadapi MEA. Selain itu sebagai bagian dari elemen bangsa, pustakawan harus bisa berperan positif dengan memberdayakan masyarakat Indonesia dalam menghadapi era komunitas ASEAN.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, dalam makalah ini akan dibahas tentang strategi pustakawan menghadapi tantangan dan peluang dalam MEA. Selain itu, dibahas juga mengenai peran pustakawan dalam memberdayakan masyarakat Indonesia dalam menghadapi

era komunitas ASEAN. Penyusunan makalah ini berdasarkan studi literatur yang berkaitan dengan topik bahasan.

Kerangka Teori

Memahami Masyarakat Ekonomi ASEAN

Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional, negara-negara anggota telah meletakkan kerja sama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan konsep yang mulai digunakan dalam Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II), Bali, Oktober 2003. MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020 “stabil, sejahtera dan menjadi kawasan yang berdaya saing tinggi dengan melalui pengembangan ekonomi yang adil, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat ASEAN”. Berdasarkan Cebu Declaration pada 13 Januari 2007 (12th ASEAN Summit) memutuskan untuk mempercepat pembentukan MEA menjadi 2015 guna memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global, terutama dari China dan India (Arifin, 2008).

Cetak biru MEA berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dilakukan melalui empat kerangka strategis, yaitu dan hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integritas ekonomi ASEAN, yaitu: (1) menuju single dan production base (arus perdagangan pasar bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal); (2) menuju penciptaan kawasan ekonomi yang berdaya saing dalam tinggi; (3) menuju kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata melalui pengembangan UKM; (4) menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam global supply network).

Menurut Sumiati (2015), terdapat peluang dengan terbentuknya MEA yaitu kesempatan berkarir lebih luas/ banyak baik dalam maupun luar negeri lingkup ASEAN, kesempatan mendapatkan ilmu pengetahuan lebih banyak, dan peningkatan kesejahteraan lebih terbuka. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah persaingan lebih ketat, diperlukan standar kompetensi setara ASEAN, diperlukan rambu seleksi rekrutment tenaga asing, penguasaan bahasa asing, penguasaan TIK, pengetahuan sumber ilmu pengetahuan, . Pelatihan kerja, serta ketersediaan informasi.

Mengenal Pustakawan

Mengenal pustakawan tidak terlepas dari keberadaan sebuah perpustakaan. Menurut Harris (1995) perpustakaan adalah koleksi (sekumpulan) bahan grafis yang di susun agar mudah digunakan, yang dikelola oleh seseorang dan dapat diakses oleh sejumlah orang. Perpustakaan sering dianggap juga sebagai monumen penting lambang kecanggihan budaya bangsa. Salah satu prinsip perpustakaan yang disampaikan oleh Ranganathan “*a library is a growing organism*”. Prinsip tersebut dapat dipahami, bahwa perpustakaan merupakan organisasi yang selalu mengalami pertumbuhan. Pada dasarnya perpustakaan merupakan organisasi nonprofit yang keberadaannya di bawah lembaga induk yang menaungi. Dengan demikian perpustakaan

mengikuti perkembangan lembaga yang menaungi, namun dapat juga berkembang secara terpisah dari lembaga induk yang menaungi. Hal ini terlihat dari perkembangan aset perpustakaan yang dimiliki.

Menurut Achmad, et.al (2012), aset berharga yang dimiliki perpustakaan, meliputi:pertama, aset perpustakaan yang bernilai ekstrinsik, merupakan nilai yang melekat pada fisik perpustakaan, terdiri dari gedung, fasilitas, koleksi, anggaran, layanan, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua, Aset perpustakaan yang bernilai intrinsik, merupakan nilai kemanfaatan dari perpustakaan, terdiri dari: nilai pendidikan, nilai sosial, nilai demokrasi, nilai budaya, dan nilai ekonomi.

Pustakawan merupakan salah satu aset berupa sumber daya manusia yang dimiliki perpustakaan. Pada awal sejarahnya, pustakawan menjadi elit politik dalam struktur sosial. Kedudukannya disejajarkan dengan tokoh spiritual dan para pemegang kebijakan, karena pada waktu itu perpustakaan hanya ada di dua tempat yaitu di istana (pusat kekuasaan) dan kuil atau tempat ibadah (pusat kekuatan spiritual).

Memahami pustakawan diambil dari International *Encyclopedia of Information and Library Science* (Feather dan Struges, 2003 dalam Purwono, 2014) menyebutkannya dalam artian tradisional dan masa kini. Pustakawan dalam artian tradisional adalah kurator koleksi buku dan materi informasi lainnya, menata akses pemakai pada koleksi tersebut dengan berbagai syarat. Pustakawan dalam arti modern adalah manajer dan mediator akses ke informasi untuk kelompok pemakai berbagai jenis, awalnya dimulai dari koleksi perpustakaan kemudian meluas ke sumber lain yang terdapat di dunia.

Di Indonesia, sejak tahun 1988 pustakawan diakui sebagai jabatan fungsional. Perhatian pemerintah terhadap profesi pustakawan menjamin dan membuka lebar peluang jenjang karier hingga 65 tahun masa pensiun. Pustakawan sebagai salah satu profesi yang diakui pemerintah harus bisa melaksanakan kewajiban serta mempertanggungjawabkan kinerjanya secara profesional. Kewajiban pustakawan seperti yang tertuang dalam pasal 31, UU No. 43/2007 adalah: pertama memberikan layanan prima terhadap pemustaka, kedua menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif, ketiga memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukan sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

Menurut Rubin (1998), syarat sebuah profesi meliputi:

“Possesses a substantial body of theoretical knowledge that forms the intellectual foundation of the profession. Permits a substantial amount of autonomy. Exercises control over the conduct of its practitioners through licensure and a code of ethics. Possesses a dominant altruistic rather than self-interested purpose. Possesses a monopoly over the practice of the profession. Possesses professional association.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami pustakawan adalah seseorang yang menghubungkan antara informasi dengan seseorang atau sekelompok orang yang membutuhkan informasi, memiliki kompetensi tertentu, dan mengikuti kode etik yang berlaku.

Pembahasan

Strategi Pustakawan Menghadapi MEA

Kesepakatan terbentuknya MEA, maka terbentuk pasar tunggal dan terbuka yang berbasis produksi, terjadi pergerakan bebas menyangkut tenaga kerja, investasi, serta modal. Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN akan menjadi negara yang akan mengikuti kesepakatan tersebut. Konsekuensinya, Indonesia akan dibanjiri oleh produk-produk luar negeri. Hal itu berarti pustakawan ASEAN dapat bergerak bebas dan bekerja di sepuluh negara anggota ASEAN. Dapat dipahami bahwa pustakawan Indonesia dapat bekerja di negara anggota ASEAN, sebaliknya tenaga profesi informasi mereka dapat memasuki lapangan kerja Indonesia. SDM Indonesia dapat “terancam” apabila tidak memiliki nilai tawar yang tinggi. Persiapan yang harus dilakukan dimulai dari manusia itu sendiri, dalam hal ini pustakawan. Menurut Sulisty-Basuki (2015), keahlian yang diperlukan dalam menghadapi MEA adalah (a) kemampuan keilmuan, (b) kemampuan teknologi informasi, (c) penguasaan bahasa Inggris, dan (d) etos kerja yang tinggi.

Pustakawan yang telah mengetahui peluang dan tantangan dalam menghadapi MEA, hendaknya memiliki strategi agar lebih siap dalam memasuki MEA. Berikut ini akan dipaparkan strategi dalam menghadapi MEA, meliputi:

1. Melaksanakan kode etik profesi

Kode etik merupakan standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi (dalam hal ini Ikatan Pustakawan Indonesia) yang menjadi landasan perilaku anggotanya (pustakawan) dalam menjalankan peran dan tugas profesinya dalam masyarakat. Dengan memahami dan mengimplementasikan setiap butir yang tertuang dalam kode etik, pustakawan dapat memberikan standar kualitas layanan. Dan, menghindarkan pemustaka dari perbuatan yang merugikan. Adanya standar layanan diharapkan pemustaka mendapat kepuasan dan dapat melakukan komplain ketika merasa dirugikan yang akan membentuk serta mempertahankan citra positif perpustakaan. Hal ini menjadi tantangan karena kode etik tidak dengan mudah dapat diterapkan.

Beberapa kendala implementasi kode etik adalah: pertama, kode etik tidak populer sehingga tidak semua pustakawan mengerti tentang kode etik. Kedua, kode etik kalah dengan kebijakan (birokrasi) artinya lembaga atau instansi tempat pustakawan bekerja memiliki birokrasi atau sistem kekuasaan sendiri yang juga berwenang atas pengambilan kebijakan untuk kepentingan lembaga atau instansi tersebut. Birokrasi menjadi kendala ketika kebijakan yang diambil tidak sejalan dengan semangat yang ada pada kode etik. Ketiga, tidak meratanya jenjang pendidikan yang ditempuh oleh pustakawan. Hal ini menjadi kendala pelaksanaan kode etik terkait dengan pemahaman dan penyikapannya terhadap kewajiban yang dituangkan dalam kode etik pustakawan. Keempat, pustakawan tidak membaca kode etik karena dianggap tidak penting. Dan, kendala kelima adalah sanksi dalam pelanggaran kode etik tidak tegas (Suwarno, 2014).

Kode etik pustakawan hendaknya tidak sekedar tulisan namun dapat menjadi bagian yang melekat dalam tiap diri perilaku pustakawan. Melaksanakan kode etik pustakawan

menjadi strategi dalam menghadapi MEA, karena pustakawan dapat menunjukkan kinerjanya secara profesional.

2. Komitmen terhadap profesi

Menurut Michael dalam Purwono (2014) komitmen adalah kegiatan yang berhubungan dengan kesetiaan terhadap organisasi. Komitmen terdiri dari tiga komponen yaitu pertama, identifikasi dengan organisasi; kedua, keinginan untuk tetap berkarya di organisasi tempat bekerja; dan ketiga kemauan untuk bekerja keras demi organisasi di mana mereka bekerja. Selanjutnya, komitmen merupakan sikap menyesuaikan diri secara mantap pada sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau komunitas tertentu.

Pustakawan dapat menunjukkan komitmennya dengan tetap berkarya meski “mungkin” tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Indikator-indikator perilaku komitmen menurut Quest (1995) dalam Djunaidi (2013) adalah (a) melakukan upaya penyesuaian, dengan cara agar cocok di organisasinya dan melakukan hal-hal yang diharapkan, serta menghormati norma-norma organisasi, menuruti peraturan dan ketentuan yang berlaku, (b) meneladani kesetiaan, dengan membantu orang lain, menghormati dan menerima hal-hal yang dianggap penting oleh atasan, bangga menjadi bagian dari organisasi, serta peduli akan citra organisasi, (c) mendukung secara aktif, dengan cara bertindak mendukung misi organisasi, (d) melakukan pengorbanan pribadi, pengorbanan dalam hal pilihan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan organisasi walaupun keputusan tersebut tidak disenangi.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Lasa (2013) bahwa orang yang memiliki komitmen tinggi biasanya memiliki kecakapan mau berkorban untuk mencapai sasaran dan bekerja profesional, selalu mencari peluang dan memanfaatkan peluang untuk berprestasi dan merasa ada dorongan dalam dirinya untuk selalu meningkatkan prestasi. Dengan demikian dapat dipahami, seorang pustakawan yang memiliki komitmen terhadap profesinya akan memiliki dorongan untuk memberikan yang terbaik dalam meningkatkan prestasi sehingga akan lebih siap dalam menghadapi MEA.

3. Mau keluar dari “zona nyaman”

Secara umum perpustakaan merupakan bagian dari institusi yang menaungi, seperti perguruan tinggi, sekolah, pemerintah daerah, BUMN ataupun institusi lain. Meskipun sekarang mulai dijumpai perpustakaan komunitas yang berdiri secara independen. Lingkungan kerja pustakawan (jenis perpustakaan) dapat berpengaruh terhadap kinerja pustakawan. Besar-kecilnya dukungan dari lembaga induk dipengaruhi oleh pemahaman pejabat terhadap arti pentingnya keberadaan sebuah perpustakaan. Hal ini karena melibatkan profesi lain dan banyaknya kepentingan. Lingkungan yang kurang mendukung seakan membatasi ruang gerak sebagian pustakawan yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa dan seolah-olah nasib pustakawan ditentukan oleh atasannya. Suasana atau atmosfer kerja yang tercipta oleh rekan seprofesi yang hanya menerima keadaan terkadang

membuat terlena dalam rutinitas kerja yang akhirnya pustakawan tersebut masuk ke dalam “zona nyaman”. Padahal zona nyaman ini kalau tidak disikapi dengan baik secara perlahan akan berakibat fatal yakni “kematian”.

Pustakawan harus mau keluar dari “zona nyaman” dengan memiliki jiwa *entrepreneurship*. Pustakawan yang *entrepreneurship* menurut Haryanti (2012) antara lain: pustakawan yang selalu memanfaatkan kesempatan menjadi peluang yang akan melahirkan kreativitas dalam pengembangan perpustakaan, bersama masyarakat menjadikan perpustakaan lebih bermakna dengan cara swadaya potensi yang ada, menjadikan perpustakaan selalu memiliki nilai jual untuk dapat berkembang dan terus memberikan manfaat buat masyarakat. Ciri yang mudah dilihat adalah pustakawan tersebut kreatif dan penuh inisiatif dalam mengerjakan tugasnya sehari-hari.

Pustakawan dengan jiwa *entrepreneurship* diharapkan lebih kreatif dan tahan uji dalam menghadapi MEA. Pustakawan harus menyadari bahwa profesi ini tidak tergantung oleh megahnya gedung, banyaknya koleksi, dan juga besarnya gaji namun ditentukan oleh diri sendiri untuk terus memberikan manfaat bagi orang lain.

4. Pengembangan diri

“Tidak ada yang abadi di dunia ini, kecuali perubahan itu sendiri” begitulah kata pepatah. Memang demikian, pustakawan harus membuka diri terhadap perubahan yang terjadi. Potensi yang dimiliki pustakawan seperti pengetahuan, keterampilan, rasa empati sebaiknya terus diperbaharui. Menurut Nurohman (2013) pengembangan diri merupakan upaya sekuat tenaga dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan bersifat temporal dalam perilaku-diri, sehingga akan menjadi katalis bagi transformasi mendalam dari dalam individu. Banyak cara untuk pengembangan diri seperti mengikuti pendidikan formal, pelatihan, seminar, aktif dalam organisasi, magang kerja dan kegiatan positif lainnya. Manfaat pengembangan diri bagi individu adalah meningkatkan kompetensi dan bisa juga memunculkan ide-ide baru, yang secara tidak langsung berdampak positif bagi organisasi. Untuk mengembangkan diri pustakawan dapat menjalin kerja sama dengan rekan seprofesi ataupun dengan profesi lain. Pustakawan harus mau mengembangkan kompetensi yang dimiliki agar siap bersinergi dengan pustakawan dari negara-negara anggota ASEAN.

5. Memiliki kompetensi tersertifikasi

Kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan standar kinerja yang ditetapkan. Standar tenaga perpustakaan dalam peraturan pemerintah RI no.24 tahun 2014 mensyaratkan seorang pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal. Kompetensi profesional mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja. Kompetensi personal mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.

The Tampa Bay Library Consortium (2002) dalam Cohn (2005), menyebutkan selain dua kompetensi yang diamanahkan dalam undang-undang tentang perpustakaan masih terdapat kompetensi yang harus dimiliki pustakawan. Kompetensi tersebut adalah *philosophical competencies* meliputi pemahaman tentang misi perpustakaan, hubungan intern perpustakaan maupun dengan perpustakaan lain, hubungan perpustakaan dengan masyarakat yang dilayani, dan juga kode etik. Kompetensi selanjutnya adalah *Technical competencies* meliputi keterampilan dasar dalam penggunaan komputer, multimedia, alat temu kembali informasi, serta memahami peran perpustakaan dalam mempromosikan penggunaan teknologi.

Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan atau internasional (Sulistyo-Basuki, 2014). Ruang lingkup uji kompetensi sesuai dengan kerangka kualifikasi profesi pustakawan sebagaimana tercantum dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia no. 83 tahun 2012, meliputi kompetensi umum, kompetensi inti, dan kompetensi khusus.

Kompetensi umum merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap pustakawan untuk melakukan tugas perpustakaan. Kompetensi ini meliputi mengoperasikan komputer tingkat dasar, menyusun rencana kerja, dan membuat laporan kerja perpustakaan. Kompetensi inti merupakan kompetensi fungsional yang harus dimiliki setiap pustakawan dalam menjalankan tugas-tugas perpustakaan, misalnya melakukan seleksi bahan perpustakaan. Kompetensi khusus merupakan kompetensi tingkat lanjut yang bersifat spesifik, misalnya merancang tata ruang dan perabot perpustakaan, membuat literatur sekunder, dan membuat karya tulis ilmiah.

Sertifikasi pustakawan dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP). LSP merupakan lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi yang telah diakreditasi dan mendapat lisensi dari Badan Nasional Standardisasi Profesi. Uji kompetensi dilakukan di Jakarta Tempat Uji Kompetensi Perpustakaan. Pustakawan yang telah memiliki kompetensi tersertifikasi diharapkan dapat menunjukkan kinerja profesional dan memiliki daya saing dalam MEA.

Peran Pustakawan dalam menghadapi MEA

MEA akan segera kita masuki sehingga era pasar bebas segera akan kita rasakan. Iklim persaingan bebas dapat mendorong masyarakat untuk lebih giat bekerja sehingga akan menciptakan budaya kerja yang tinggi, sehingga akan menciptakan masyarakat yang ingin meningkatkan kualitasnya dalam menghadapi ketatnya persaingan kerja di pasar internasional. Sisi negatif era pasar bebas akan membawa muatan-muatan ideologi ataupun budaya luar sehingga memerlukan kearifan bangsa Indonesia untuk selektif dalam menyaring muatan-muatan itu (Nugrohoadi, 2014).

Hakikat keberadaan perpustakaan adalah bagian dari khasanah bangsa Indonesia yang menyimpan berbagai ilmu pengetahuan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa.

Masyarakat perlu mempunyai kemampuan literasi informasi di tengah kompetisi global. Pustakawan sebagai ujung tombak SDM dalam perpustakaan memainkan peran utama dalam mengantarkan literasi informasi sebagai kemampuan dasar masyarakat.

Istilah *information literacy* pertama kali dipakai oleh Paul Zurkowski, presiden dari *Information Industry Association* (IIA) pada tahun 1974 dalam proposal yang diajukan ke Komisi Nasional tentang Perpustakaan dan Ilmu Informasi (NCLIS). Periode 1983-1992 pustakawan Amerika mulai membahas dan menyadari perlunya kemampuan dalam *information literacy* (Sudarsono, 2009). Menurut UNESCO:

“information literacy encompasses knowledge of one’s information concerns and needs, and the ability to identify, locate, evaluate, organize and effectively create, use and communicate information to address issues or problems at hand; it is a prerequisite for participating effectively in the Information Society, and is part of the basic human right of life long learning.” (US National Commission on Library and Information Science, 2003 dalam Sudarsono, 2009)

Kegiatan literasi informasi dalam SKKNI mencakup kegiatan untuk meningkatkan kemampuan pemustaka (masyarakat) yang dibutuhkan dalam mengevaluasi secara kritis cakupan isi informasi dan menggunakannya secara efektif, sesuai etika informasi serta memahami infrastruktur informasi yang mendasari pengiriman informasi mencakup hubungan dan pengaruh sosial, politik, dan budaya. Perpustakaan atau pustakawan dapat melakukan kegiatan literasi informasi menggunakan model yang dikembangkan sendiri disesuaikan dengan lingkup pemustakanya. Pengenalan literasi informasi kepada masyarakat dapat dilakukan melalui kampanye literasi informasi secara nasional atau melalui kelas-kelas kecil dan rutin dengan pemustaka yang berbeda-beda dalam bimbingan pemustaka yang telah dilayani (Wicaksono, 2015). Masyarakat yang memiliki kemampuan literasi informasi akan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mampu berpikir kritis terhadap informasi. Hal tersebut dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi kompetisi global.

PENUTUP

Berdasarkan penandatanganan Piagam ASEAN dan Cetak biru ASEAN menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-13 di Singapura (November, 2007), Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN harus siap menghadapi konsekuensi dari integritas ekonomi tersebut. Kesepakatan MEA, akan terbentuk pasar tunggal dan terbuka yang berbasis produksi, terjadi pergerakan bebas menyangkut tenaga kerja, investasi, serta modal. Membanjirnya produk-produk luar negeri akan semakin masif. Sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi akan lebih mudah bersinergi dengan tenaga ahli berasal dari negara-negara ASEAN. Hal tersebut berarti MEA tidak dapat dihindari.

Pustakawan sebagai salah satu SDM di Indonesia harus bisa melihat setiap peluang dan memahami tantangan dalam MEA. Terdapat beberapa strategi yang perlu dilakukan

pustakawan dalam menghadapi MEA yaitu (1) melaksanakan kode etik profesi, (2) komitmen terhadap profesi, (3) Mau keluar dari zona “nyaman”, (4) pengembangan diri, (5) memiliki kompetensi tersertifikasi. Pustakawan yang mampu melaksanakan strategi tersebut dapat menunjukkan kinerja profesional dan siap memasuki MEA.

Adapun peran pustakawan dalam memberdayakan masyarakat adalah dengan melakukan literasi informasi yaitu upaya yang dilakukan oleh pustakawan sebagai individu ataupun secara lembaga (perpustakaan) agar masyarakat “melek” informasi. Masyarakat yang melek informasi akan menjadi pembelajar seumur hidup yang mengetahui kapan dia butuh informasi, bagaimana mendapatkan, menggunakan/ memanfaatkan, dan menyebarkan informasi. Pustakawan berperan mengantarkan literasi informasi sebagai kemampuan dasar masyarakat dalam menghadapi MEA. Dengan melakukan literasi informasi, pustakawan telah berperan dalam meningkatkan kompetensi masyarakat di tengah kompetisi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, et.al. (2012). *Layanan Cinta Perwujudan Layanan Prima ++ Perpustakaan*. Jakarta: Sagung Seto
- Arifin, Sjamsul; Rizal A. Djaafara, Aida S. Budiman (Editor). 2008. *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: memperkuat sinergi ASEAN di tengah kompetisi global*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Nurohman, Aris. 2013. *Pengembangan Diri (Self Development) Menuju Pustakawan Profesional*. Paper dipresentasikan dalam Seminar Ikatan Pustakawan Indonesia Daerah Kabupaten Banyumas, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, tanggal 1 Desember 2013
- ASEAN selang pandang*. 2007. Jakarta: Dirjen Kerja sama ASEAN, Deplu RI
- Cohn, John M and Ann L. Kelsey. (2005). *Staffing the Modern Library: a How-to-do-it Manual*. New York: Neal-Schuman Publishers
- Djunaidi. 2013. “Beberapa potensi yang harus dimiliki oleh seorang pustakawan”. *Jurnal Kepustakawanan dan Masyarakat Membaca*, Vol 29 (2), 39-50
- Harris, Michael H. (1995). *History of Libraries in the Western World*, 4th ed. NJ: Scarecrow Press, 3-16
- Haryanti, Trini. 2012. *Entrepreneurship Pustakawan sebuah Passion Mewujudkan Prestasi*. Makalah disampaikan dalam kuliah umum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 15 Maret
- Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2012. *Keputusan Menteri Nomor 83 tahun 2012 tentang penetapan rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya: bidang perpustakaan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional*

Indonesia. [file:///D:/airlangga/SKKNI Bidang Perpustakaan.pdf](file:///D:/airlangga/SKKNI_Bidang_Perpustakaan.pdf) diakses pada 10 Agustus 2015, 13.30 WIB

Indonesia. 2007. [Undang-Undang, peraturan, dsb] *Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional

Indonesia. 2014. [Undang-Undang, peraturan, dsb] *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional

Lasa HS.2013. "Membangun etika kepastakawanan". *Media Pustakawan*, Vol. 20(4), 20-27

Nugrohadhi, Agung. 2014. "Pustakawan sebagai pemelihara semangat nasionalisme Indonesia menghadapi AFTA 2015". *Libraria Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* vol 3 (2) 55-69

Purwono.(2014). *Materi Pokok Profesi Pustakawan*. Jakarta: Universitas Terbuka

Rubin, Richard E. (1998). *Foundation of Library and Information Science*. New York: Neal-Schuman Publishers

Sudarsono, Blasius.2009. *Pustakawan Cinta dan Teknologi*. Jakarta: Sagung Seto

Sulistyo-Basuki. 2015. *Refleksi Kepustakawanan Indonesia 1963-2013*. Makalah disampaikan dalam seminar nasional dan bedah buku, Semarang, 17 Januari 2015 diselenggarakan oleh Universitas Semarang

Sulistyo-Basuki. 2014. *Sertifikasi Pustakawan*.

<https://Sulistiyobasuki.wordpress.com/2014/07/05/sertifikasi-pustakawan/>

Diakses pada tanggal 10 Agustus 2015, 14.00 WIB

Sumiati, Opong. 2015. *Pustakawan Indonesia dan AFTA 2015: peluang dan tantangan*. Makalah disampaikan dalam seminar nasional dan bedah buku, Semarang, 17 Januari 2015 diselenggarakan oleh Universitas Semarang.

Suwarno, Wiji. (2014). "Budaya Organisasi dan Kode Etik Pustakawan: Kritik antara Tradisi dengan Kewajiban". *Buletin Pustakawan*, Edisi pertama, Jan-Juni 2014, 43-46

Wicaksono, Arief. 2015. "4i (Kenali-Cari-Pakai-Evaluasi): usukan model literasi informasi di Perpustakaan RI untuk pengenalan dan pengajaran literasi informasi bagi masyarakat Indonesia". *Visipustaka*, 17 (1) 11-19.